

Islam, Budaya, dan Komunikasi Publik: Sinergi Pemimpin Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Era Digital

Joko Hariadi¹, Hasan Sazali², Nur Amelia^{3*}

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

³Universitas Samudra

Korespondensi*: joko4004243003@uinsu.ac.id¹, hasansazali@uinsu.ac.id²,
nur.ameliapsp@unsam.ac.id³

Abstract

Aceh as a province rich in its Islamic heritage and local culture, is faced with a major challenge in enhancing civic participation through the utilisation of digital technology. This research aims to identify the important role of Acehnese leaders in utilising digital media to strengthen Islamic values and local culture, as well as increase community engagement in the development process. The method used is a qualitative approach through a literature review that focuses on analysing various relevant sources, such as scientific journals, books, and reports related to public communication in Aceh. The results show that Acehnese leaders have successfully utilised social media and other digital platforms to spread religious and cultural messages in line with Islamic teachings, which in turn encourages community participation in various social and political activities. However, challenges remain related to the digital divide and uneven understanding among the public. The findings emphasise the importance of Aceh's leaders in bridging this gap with a more inclusive approach.

Keywords: culture; digital era; Islam; public communication; community participation

Abstrak

Aceh sebagai provinsi yang kaya akan warisan Islam dan budaya lokalnya, dihadapkan pada tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran penting pemimpin Aceh dalam memanfaatkan media digital untuk memperkuat nilai-nilai Islam dan budaya lokal, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui kajian literatur yang berfokus pada analisis berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan terkait komunikasi publik di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin Aceh telah berhasil memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan pesan keagamaan dan budaya yang sejalan dengan ajaran Islam, yang pada gilirannya mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Namun, tantangan masih ada terkait dengan kesenjangan digital dan pemahaman yang tidak merata di kalangan masyarakat. Temuan ini menekankan pentingnya pemimpin Aceh dalam menjembatani kesenjangan ini dengan pendekatan yang lebih inklusif.

Kata Kunci: budaya; era digital; islam; komunikasi public; partisipasi masyarakat

Article History:

Received: 30 Maret 2025

Accepted: 21 April 2025

Published: 28 April 2025



Pendahuluan

Perkembangan dunia saat ini terhadap berbagai hal sangat mempengaruhi banyak dimensi kehidupan manusia dengan cepat. Perkembangan tersebut bukan hanya mengenai pergeseran budaya yang dahulunya tradisional menjadi modern, tetapi juga menggeser pola pikir dan gaya hidup manusia. Era perubahan yang nyata terasa saat ini adalah perubahan akibat adanya Revolusi Industri 4.0 (Sabrina, 2021). Pergeseran sistem kerja yang dahulunya masih bersifat manual dan harus dikerjakan sendiri oleh manusia kini berkembang menjadi serba instan melalui pemanfaatan teknologi dengan berbagai kemudahan di dalamnya (Fatma & Syahrani, 2024). Salah satunya adalah dalam hal cara berkomunikasi, yang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Komunikasi yang dulu terbatas pada interaksi langsung atau melalui media cetak kini telah bergeser menuju penggunaan media sosial dan platform digital yang lebih efisien, memungkinkan informasi tersebar lebih cepat dan luas.

Aceh sebagai provinsi yang kaya akan warisan Islam dan budaya lokalnya, dihadapkan pada tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Aceh, sebagai daerah yang menerapkan hukum syariat Islam, Aceh memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan tidak hanya mencerminkan nilai-nilai agama, tetapi juga dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif (Ranisa, Mulyazir, & Rifai, 2024). Di tengah pesatnya transformasi digital ini, pemimpin Aceh memegang peran kunci dalam merancang dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang dapat menghubungkan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Selain itu, mereka juga harus memperkuat nilai-nilai Islam dan budaya Aceh dalam setiap langkah pembangunan, memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya bersifat modernisasi semata, tetapi juga mencerminkan identitas dan kearifan lokal yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Aceh.

Pemimpin Aceh memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, tidak hanya melalui kebijakan dan program, tetapi juga melalui komunikasi yang efektif. Di era digital ini, komunikasi publik tidak lagi bersifat satu arah, tetapi lebih kepada komunikasi dua arah yang melibatkan masyarakat secara aktif (Rakhmadani, 2022). Pemimpin Aceh harus mampu menjadi fasilitator yang menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, baik di tingkat perkotaan maupun pedesaan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan atau program yang diluncurkan dapat diterima, dimengerti, dan diimplementasikan dengan partisipasi masyarakat yang maksimal. Namun, tantangan utama adalah bagaimana pemimpin Aceh dapat memanfaatkan komunikasi publik berbasis digital untuk mengatasi ketimpangan dalam akses teknologi dan literasi digital, serta memastikan bahwa pesan yang disampaikan sejalan dengan nilai-nilai Islam dan budaya Aceh. Dalam konteks ini, peran pemimpin Aceh menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan melalui platform digital bukan hanya berupa pemberitahuan, tetapi juga menjadi ajakan untuk berpartisipasi, berkolaborasi, dan berkontribusi dalam pembangunan. Pemimpin harus dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka, baik dalam keputusan-keputusan politik maupun dalam kegiatan sosial yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama (Mahyudin et al., 2022).

Islam sebagai landasan moral dan etika masyarakat Aceh memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk sikap dan tindakan masyarakat (Muthia, 2021). Oleh karena itu, pemimpin Aceh perlu mengintegrasikan pesan-pesan Islam dalam strategi komunikasi publik, agar masyarakat tidak hanya memahami kebijakan pemerintah tetapi juga merasa terdorong untuk berpartisipasi berdasarkan nilai-nilai agama. Di sisi lain, budaya Aceh, dengan norma-norma dan tradisinya yang sangat kuat, juga harus

dipertimbangkan dalam setiap strategi komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah (Bintang, Nugraha, dan Azis, 2024). Pemimpin Aceh harus dapat menjaga keseimbangan antara implementasi nilai-nilai Islam dan budaya lokal, agar setiap kebijakan atau program pembangunan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, terlepas dari latar belakang sosial dan geografis mereka.

Pemimpin Aceh juga diharapkan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam komunikasi publik, dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Namun, komunikasi digital yang efektif bukan hanya soal pengiriman informasi, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan keterlibatan dan kolaborasi masyarakat. Pemimpin Aceh harus bisa menciptakan ruang dialog yang terbuka, di mana masyarakat dapat menyuarakan pendapat, memberi masukan, dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemimpin Aceh dalam memanfaatkan komunikasi publik berbasis digital untuk memperkuat nilai-nilai Islam dan budaya Aceh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan meninjau berbagai sumber yang relevan, penelitian ini akan menganalisis langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah Aceh untuk merancang komunikasi publik yang tidak hanya efektif, tetapi juga inklusif dan berbasis pada nilai-nilai agama dan budaya lokal. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berharga untuk memperbaiki kebijakan dan pendekatan komunikasi publik yang digunakan oleh pemimpin Aceh, agar tercipta masyarakat yang lebih terlibat dan berdaya dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review. Metode literatur review ini merupakan salah satu alternatif metode dalam penulisan karya ilmiah berdasarkan artikel sebelumnya (Sastypratiwi & Nyoto, 2020). Metode ini sebagai dasar untuk menganalisis berbagai bentuk komunikasi publik yang diterapkan oleh pemerintah Aceh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di era digital. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial melalui penelaahan sumber-sumber tertulis yang relevan. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari artikel ilmiah, buku, jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan dan publikasi resmi yang membahas isu-isu terkait komunikasi publik, peran Islam, budaya lokal, serta penggunaan media digital di Aceh. Kriteria pemilihan sumber didasarkan pada relevansi topik, tingkat keilmiahannya, dan kemutakhiran data, terutama yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan seleksi terhadap literatur yang berasal dari sumber terpercaya dan telah melalui proses peer-review.

Proses analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik. Analisis tematik merupakan metode dalam penelitian kualitatif (Rozali, 2022). Tahapan analisis dimulai dari membaca dan memahami setiap sumber secara menyeluruh, kemudian mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan komunikasi publik, partisipasi masyarakat, serta nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Tema-tema tersebut dikategorikan dan dikaji secara mendalam untuk melihat hubungan antar tema serta relevansinya dengan konteks komunikasi publik di Aceh. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis. Hasil kajian disusun dalam bentuk narasi yang menggambarkan pola-pola komunikasi publik, tantangan yang dihadapi pemerintah, serta peluang yang muncul dari pemanfaatan media digital dalam membangun partisipasi masyarakat. Dengan

demikian, literature review ini tidak hanya menyajikan ringkasan dari berbagai sumber, tetapi juga memberikan sintesis dan interpretasi berdasarkan konteks lokal Aceh.

Hasil dan Pembahasan

Integrasi Nilai Islam dalam Komunikasi Publik

Salah satu strategi komunikasi publik yang menonjol di Aceh adalah integrasi nilai-nilai Islam dalam penyampaian pesan kepada masyarakat (Maawiyah dan Syahrizal, 2023). Pemimpin daerah menyadari bahwa Islam bukan hanya aspek spiritual, tetapi juga menjadi fondasi sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pesan-pesan publik yang dikemas dengan nuansa religius lebih mudah diterima, dipahami, dan diinternalisasi oleh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga menciptakan legitimasi moral dalam pelaksanaan kebijakan. Media sosial menjadi alat utama dalam menyebarkan pesan berbasis nilai Islam (Yati, Putri, Putri, Junia, Susanti, dan Natalia, 2023). Pemimpin daerah dan lembaga pemerintahan menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube untuk menyampaikan ceramah, kutipan ayat Al-Qur'an, hadis, serta pesan moral yang relevan dengan isu-isu aktual. Konten tersebut disusun sedemikian rupa agar menarik bagi generasi muda, yang merupakan pengguna aktif media sosial. Dengan strategi ini, nilai-nilai Islam tidak hanya disebarkan melalui masjid atau mimbar, tetapi juga hadir dalam ruang digital masyarakat sehari-hari.

Pesan-pesan yang disampaikan mencakup berbagai isu sosial seperti pentingnya menjaga persaudaraan, keadilan dalam bermasyarakat, serta kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Nilai-nilai ini dikaitkan langsung dengan kebijakan pemerintah, seperti partisipasi dalam musyawarah pembangunan desa, pemilu, atau kegiatan sosial. Dengan cara ini, komunikasi publik tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga menjadi sarana dakwah yang membangkitkan kesadaran kolektif berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Keterkaitan antara ajaran agama dan kebijakan publik membuat pesan pemerintah lebih membumi dan tidak terasa menggurui. Strategi ini juga menjawab tantangan komunikasi di tengah masyarakat yang masih memegang erat adat dan agama (Colina, 2021). Pemerintah Aceh menggunakan pendekatan persuasif religius yang membuat masyarakat merasa dihargai secara identitas dan spiritualitas (Masriadi, Hasan, Andyna, dan Bahri, 2021). Sebagai contoh, kampanye tentang pentingnya vaksinasi atau pemilu sering kali dikaitkan dengan konsep *maslahah* (kebaikan bersama) dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menyampaikan kebijakan secara teknokratis, tetapi juga mementulkannya dalam kerangka etika Islam yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Aceh.

Keterlibatan ulama dan tokoh agama dalam menyampaikan komunikasi publik juga menjadi kekuatan strategis (Sofyan, Laksono, dan Chabibi, 2020). Pemerintah secara aktif menggandeng Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan dai lokal untuk menguatkan pesan-pesan pembangunan (Mildad dan Jamal, 2013). Kolaborasi ini menciptakan kepercayaan yang tinggi, karena ulama dipandang sebagai figur yang memiliki otoritas moral dan spiritual. Keterlibatan tokoh agama dalam ruang digital menambah kredibilitas pesan dan menghindarkan pemerintah dari tuduhan sekulerisasi atau pengabaian terhadap nilai-nilai Islam. Namun, integrasi nilai Islam dalam komunikasi publik juga memerlukan sensitivitas dan kehati-hatian. Pemilihan narasi yang tidak tepat dapat memicu resistensi dari kelompok yang berbeda tafsir atau latar belakang. Oleh karena itu, pemimpin Aceh dituntut untuk memahami dinamika keagamaan secara mendalam dan menggunakan pendekatan yang inklusif. Strategi komunikasi berbasis Islam harus tetap membuka ruang dialog, bukan menutupnya dengan dalih otoritas agama semata. Inilah tantangan besar yang

harus terus dikelola agar komunikasi tetap relevan, humanis, dan membangun (Hilmi, Alfandi, dan Prisdayanti, 2022).

Integrasi nilai Islam dalam komunikasi publik di Aceh menunjukkan bahwa agama dapat menjadi kekuatan sosial yang konstruktif jika dikelola dengan bijak. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pembangunan masyarakat tidak hanya mengandalkan kebijakan teknis, tetapi juga membutuhkan fondasi etis yang kuat. Pemimpin Aceh yang mampu menggabungkan antara teknologi digital dan nilai spiritual menunjukkan model kepemimpinan yang adaptif namun tetap berakar. Dengan demikian, komunikasi publik di Aceh bukan hanya persoalan strategi penyampaian, tetapi juga menjadi ekspresi dari identitas kolektif masyarakat yang religius dan dinamis.

Pelestarian Budaya Lokal Melalui Media Digital

Pelestarian budaya lokal Aceh melalui media digital menjadi salah satu bentuk inovasi dalam menghadapi tantangan globalisasi (Al Ghifary, Az Zahra, Yusron, dan Yuningsih, 2024). Di tengah gempuran budaya luar yang begitu masif melalui internet, pemerintah dan pemimpin lokal Aceh menyadari pentingnya digitalisasi sebagai cara untuk mempertahankan identitas budaya. Media digital dimanfaatkan untuk mendokumentasikan dan menyebarkan praktik budaya seperti tari tradisional, musik, kuliner, bahasa daerah, hingga adat istiadat lokal. Pendekatan ini tidak hanya menjadi sarana edukasi budaya, tetapi juga memperkuat kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur mereka. Pemerintah Aceh secara aktif menggandeng komunitas seni dan budaya untuk memproduksi konten digital yang menarik, seperti video dokumenter, podcast budaya, hingga konten visual di media sosial (Pramana dan Arung Triantoro, 2024). Program seperti "Aceh dalam Lensa Budaya" menjadi salah satu contoh nyata bagaimana digitalisasi digunakan untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Platform seperti YouTube dan Instagram menjadi ruang strategis untuk menayangkan kegiatan budaya, baik yang bersifat edukatif maupun hiburan. Upaya ini penting untuk menjangkau audiens muda yang selama ini lebih akrab dengan media daring ketimbang acara seremonial budaya konvensional. Selain itu, pelestarian budaya melalui media digital juga diarahkan untuk memperluas jangkauan ke luar daerah, bahkan hingga tingkat global. Konten-konten digital yang dibuat dalam dua bahasa. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris menjadi jembatan untuk memperkenalkan budaya Aceh ke kancah internasional. Hal ini juga menjadi bagian dari diplomasi budaya yang bisa membangun citra positif Aceh sebagai daerah yang religius dan kaya akan tradisi. Pemimpin Aceh mendorong agar konten digital tidak hanya menjadi dokumentasi pasif, tetapi menjadi media interaktif yang mampu mengundang partisipasi, komentar, dan keterlibatan dari masyarakat luas.

Digitalisasi budaya juga berfungsi sebagai bentuk pengarsipan sejarah yang dapat diakses secara berkelanjutan (Adriyana dan Cahyaningtyas, 2023). Dalam banyak kasus, nilai-nilai budaya Aceh berisiko punah jika hanya bergantung pada transmisi lisan antar generasi. Dengan kehadiran teknologi digital, pelestarian budaya menjadi lebih sistematis, terdokumentasi, dan memiliki daya simpan yang panjang. Situs web resmi pemerintah, kanal YouTube, dan perpustakaan digital daerah kini menjadi gudang informasi budaya yang bisa diakses kapan saja oleh siapa pun. Ini merupakan langkah maju dalam mengintegrasikan budaya dengan perkembangan teknologi secara harmonis. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan serius terkait rendahnya literasi digital di kalangan pelaku budaya tradisional. Banyak seniman dan budayawan yang belum familiar dengan teknologi digital sehingga perlu adanya pelatihan dan pendampingan dari pemerintah (Dwihantoro, Susanti, Sukmasetya, dan Faizah, 2023). Di sinilah peran pemimpin daerah menjadi vital untuk menjembatani antara kearifan lokal dengan perkembangan teknologi. Kolaborasi lintas generasi dan lintas bidang menjadi kunci dalam memastikan bahwa

pelestarian budaya tidak berhenti di tangan segelintir pihak, tetapi menjadi gerakan kolektif masyarakat Aceh.

Di sisi lain, perlu diantisipasi pula adanya komodifikasi budaya yang bisa mereduksi makna asli dari tradisi yang diangkat. Konten digital yang terlalu mengikuti tren viral bisa saja mengaburkan nilai filosofis dan spiritual yang terkandung dalam budaya Aceh. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan editorial dan kuratorial dalam produksi konten digital, agar budaya tetap disajikan secara otentik namun tetap menarik secara visual dan naratif. Pemerintah harus memainkan peran pengawas sekaligus pendukung kreatif bagi para pembuat konten budaya. Upaya pelestarian budaya melalui media digital di Aceh membuktikan bahwa kearifan lokal dapat bersanding dengan kemajuan zaman tanpa kehilangan esensi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak lagi bersifat stagnan atau seremonial, tetapi adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial. Dengan strategi ini, budaya Aceh tidak hanya diwariskan tetapi juga dikembangkan dan dimodernisasi sesuai dengan konteks zaman. Jika dijalankan secara berkelanjutan dan inklusif, pelestarian budaya digital dapat memperkuat jati diri masyarakat Aceh sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan berbasis budaya.

Optimalisasi Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Media sosial menjadi alat yang sangat strategis dalam menjangkau masyarakat Aceh secara lebih luas dan cepat, terutama di era digital saat ini. Pemerintah dan pemimpin daerah telah mulai menyadari bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dibangun melalui pertemuan formal, tetapi juga melalui komunikasi informal yang terjadi di ruang digital (Fantini & Tamba, 2023). Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube dimanfaatkan sebagai medium untuk menyampaikan informasi kebijakan, program sosial, dan ajakan partisipatif (Siregar, 2022). Dengan memanfaatkan algoritma media sosial, konten yang diproduksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan audiens, baik dari sisi usia, lokasi, maupun minat (Alwan dan Kusumandyoko, 2023). Partisipasi digital ini tidak hanya terbatas pada bentuk respons pasif seperti menyukai atau membagikan unggahan, tetapi juga mendorong diskusi aktif melalui kolom komentar, survei daring, dan forum komunitas. Pemimpin Aceh mulai membuka ruang interaksi langsung dengan masyarakat melalui fitur live streaming dan tanya-jawab terbuka yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi mereka (Mushallin, Hasan, dan Ahmady, 2022). Pola ini menunjukkan pergeseran komunikasi publik dari yang bersifat satu arah menjadi dialogis dan kolaboratif. Masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang dilibatkan sejak proses perencanaan hingga evaluasi (Fanzikri, 2022).

Salah satu kekuatan media sosial adalah kemampuannya untuk membangun kedekatan emosional antara pemimpin dan masyarakat (Ahmad et.al, 2024). Pemimpin yang aktif membagikan kegiatan, pandangan, dan bahkan kehidupan pribadinya secara terbatas, menciptakan kesan transparansi dan keterbukaan. Ini penting dalam membangun kepercayaan publik yang menjadi prasyarat utama bagi partisipasi yang bermakna. Strategi komunikasi yang otentik dan humanis ini terbukti lebih efektif dibanding pendekatan birokratis yang kaku. Namun, optimalisasi media sosial juga menuntut adanya strategi komunikasi digital yang matang. Konten yang dipublikasikan harus memperhatikan sensitivitas budaya dan nilai-nilai Islam yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Kesalahan dalam penggunaan simbol atau narasi dapat berujung pada penolakan atau bahkan konflik sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan ahli komunikasi, sosiolog, dan tokoh agama dalam perumusan pesan publik digital. Selain itu, keterlibatan komunitas lokal dalam produksi dan penyebaran informasi di media sosial juga menjadi kunci suksesnya optimalisasi ini. Komunitas pemuda, mahasiswa, dan pegiat media lokal dapat dijadikan mitra strategis dalam menyampaikan informasi secara kreatif dan relevan.

Pelibatan ini sekaligus membuka peluang kerja sama lintas sektor yang memperkuat ekosistem komunikasi digital berbasis partisipasi. Dengan begitu, media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat. Meski demikian, terdapat tantangan signifikan dalam aspek literasi digital. Tidak semua masyarakat Aceh memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup untuk mengakses serta memverifikasi informasi di media sosial. Ini membuka celah bagi penyebaran hoaks dan disinformasi yang bisa mengganggu proses partisipatif. Untuk itu, optimalisasi media sosial harus diiringi dengan program literasi digital yang masif dan berkelanjutan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan masyarakat pedesaan.

Pemerintah juga perlu membangun sistem umpan balik yang lebih terstruktur untuk menampung aspirasi yang muncul dari media sosial. Tanpa mekanisme tindak lanjut yang jelas, partisipasi masyarakat berisiko menjadi simbolik belaka. Dengan menyediakan kanal aduan digital, sistem pelaporan transparan, serta dokumentasi tindak lanjut kebijakan, pemerintah dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas komunikasi digitalnya. Partisipasi yang direspon dengan aksi nyata akan meningkatkan kepercayaan dan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan daerah. Dengan pendekatan yang inklusif, kreatif, dan terstruktur, media sosial dapat menjadi pengungkit utama partisipasi masyarakat Aceh dalam pembangunan. Lebih dari sekadar sarana penyebaran informasi, media sosial harus dilihat sebagai ruang bersama yang memungkinkan masyarakat terlibat, berkontribusi, dan merasa didengarkan. Bila dikelola dengan tepat, media sosial akan menjadi jembatan yang mempertemukan nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan teknologi modern dalam satu harmoni pembangunan berkelanjutan.

Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Komunikasi Publik Aceh

Kepemimpinan transformasional menjadi kunci dalam menggerakkan komunikasi publik yang efektif dan partisipatif di Aceh. Pemimpin dengan gaya ini tidak hanya fokus pada pelaksanaan program dan kebijakan, tetapi juga berusaha membangun visi bersama dengan masyarakat (Prasetyo, 2022). Mereka memosisikan diri sebagai agen perubahan yang menginspirasi, memotivasi, dan memberikan keteladanan dalam menjalankan nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Kepemimpinan semacam ini menjadi penting, terutama dalam konteks Aceh yang memiliki struktur sosial berbasis nilai religius dan kultural yang kuat (Kasim dan Nurdin, 2016). Pemimpin transformasional di Aceh biasanya dikenal karena kemampuannya berkomunikasi secara personal dan merakyat (Yusransal, 2023). Mereka tidak hanya berbicara dari podium atau kantor pemerintahan, tetapi turun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan menyampaikan kebijakan dengan bahasa yang sederhana. Pendekatan ini membuat masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pembangunan. Dengan komunikasi yang terbuka dan membumi, pemimpin bisa membangun hubungan emosional yang erat dengan warga, menciptakan solidaritas dan kepercayaan timbal balik.

Selain itu, pemimpin transformasional cenderung memberikan ruang kepada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri. Dalam konteks komunikasi publik, ini berarti adanya dorongan kepada masyarakat untuk menyampaikan ide, kritik, dan solusi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan forum tatap muka. Pemimpin bukan lagi satu-satunya pusat gagasan, melainkan fasilitator yang mendukung munculnya inisiatif-inisiatif dari bawah. Dengan pola ini, partisipasi masyarakat menjadi lebih aktif dan berdaya, bukan sekadar mengikuti arahan dari atas. Pemimpin transformasional juga biasanya memiliki kepekaan tinggi terhadap dinamika sosial dan perubahan zaman. Mereka memahami bahwa di era digital, kecepatan dan ketepatan informasi sangat menentukan persepsi publik. Oleh karena itu, mereka tidak ragu berinvestasi dalam penguatan kapasitas tim komunikasi publik, penggunaan teknologi

digital, serta pelatihan bagi aparatur desa dan kota agar lebih responsif. Kepemimpinan seperti ini menciptakan sistem komunikasi yang adaptif, tidak hanya reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktif membangun narasi positif dan harapan masa depan. Namun, gaya kepemimpinan ini tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya dukungan struktural dan budaya organisasi yang sehat. Kepemimpinan transformasional harus didukung oleh birokrasi yang fleksibel, terbuka terhadap kritik, serta berani mengambil inovasi. Sayangnya, dalam beberapa kasus, resistensi dari aparat birokrasi yang konservatif atau kurang memahami media digital menjadi penghambat. Maka dari itu, pemimpin transformasional juga harus menjadi agen perubahan internal di lingkungan pemerintahannya.

Salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan transformasional dalam komunikasi publik di Aceh adalah meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, forum konsultasi publik, serta kegiatan sosial yang diinisiasi pemerintah (Sukri, 2017). Warga merasa suara mereka penting dan berdampak. Di sisi lain, pemimpin yang berhasil menjalankan peran transformasional juga dapat menurunkan angka konflik sosial karena komunikasi yang terbuka cenderung mengurangi kesalahpahaman. Ini menunjukkan bahwa komunikasi publik yang baik dapat memperkuat stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun demikian, tidak semua pemimpin di Aceh memiliki kapasitas kepemimpinan transformasional. Diperlukan pelatihan kepemimpinan, mentoring, serta regenerasi yang berkelanjutan agar karakteristik ini tertanam pada pejabat di semua level, dari gampong hingga provinsi. Investasi dalam pembangunan kapasitas kepemimpinan ini sangat penting demi keberlanjutan tata kelola komunikasi publik yang inklusif dan partisipatif.

Dengan demikian, peran kepemimpinan transformasional dalam komunikasi publik di Aceh tidak hanya mempengaruhi kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menjadi pilar utama dalam keberhasilan pembangunan daerah. Pemimpin yang mampu mengintegrasikan nilai religius, budaya lokal, dan pendekatan digital secara harmonis, akan menjadi motor penggerak perubahan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, komunikasi publik bukan sekadar sarana penyampaian informasi, tetapi instrumen transformasi sosial yang menyatukan aspirasi dan tindakan dalam semangat kolektif membangun Aceh.

Implikasi

Penelitian ini memiliki dua implikasi utama, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis, yang keduanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian komunikasi publik serta pelaksanaan strategi komunikasi dalam konteks lokal dan digital. Secara teoritis, temuan ini memperkaya wacana komunikasi publik dengan memperluas perspektif bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh saluran atau media yang digunakan, tetapi juga oleh nilai-nilai kultural dan religius yang mendasarinya. Dalam konteks Aceh, pendekatan komunikasi yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal terbukti lebih mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dibandingkan pendekatan formal-institusional semata. Hal ini menunjukkan bahwa teori komunikasi harus mengakomodasi faktor-faktor kultural-religius sebagai bagian dari variabel penting dalam proses komunikasi publik, khususnya di wilayah dengan identitas kolektif yang kuat. Temuan ini juga mendukung dan mengembangkan teori kepemimpinan transformasional dalam ranah komunikasi publik. Kepemimpinan yang inspiratif, terbuka, dan responsif terbukti mampu menciptakan ruang partisipasi masyarakat yang lebih inklusif, bahkan dalam ruang digital. Oleh karena itu, model kepemimpinan ini dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan teori komunikasi kepemimpinan, terutama dalam konteks pemerintahan daerah yang berakar kuat pada budaya lokal. Penelitian ini turut

mendorong studi lanjutan untuk mengintegrasikan model komunikasi berbasis nilai dengan pendekatan teknologi digital secara lebih holistik.

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas bagi pemerintah daerah, khususnya di Aceh, untuk merancang strategi komunikasi publik yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Pendekatan ini bukan hanya memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat, tetapi juga mendorong munculnya partisipasi yang lebih tulus dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, pemerintah perlu melibatkan tokoh agama, adat, serta komunitas lokal dalam setiap proses komunikasi kebijakan, mulai dari perencanaan hingga diseminasi informasi. Ini menjadi bentuk konkret dari komunikasi yang inklusif dan dialogis. Pemanfaatan media sosial secara optimal juga menjadi rekomendasi praktis yang sangat penting. Pemerintah perlu membangun kapasitas tim komunikasi digital yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga memahami konteks sosial budaya masyarakat Aceh. Konten yang disampaikan melalui media digital harus dikemas secara kreatif, namun tetap mengedepankan kesantunan, kejujuran, dan relevansi dengan nilai-nilai Islam. Strategi ini akan menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif bagi keterlibatan masyarakat. Selain itu, implikasi praktis lainnya adalah pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan kelompok rentan. Pemerintah bersama komunitas lokal harus menyediakan pelatihan, pendampingan, dan akses teknologi yang memadai agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif dalam ruang komunikasi digital. Tanpa intervensi ini, kesenjangan digital akan terus memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyatnya, serta menghambat upaya partisipasi yang merata.

Akhirnya, implikasi praktis juga menyasar pada reformasi birokrasi internal. Aparatur pemerintah perlu didorong untuk lebih terbuka terhadap kritik, kolaboratif dalam bekerja, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Kepemimpinan yang mendukung transformasi budaya organisasi akan menjadi faktor penentu keberhasilan komunikasi publik berbasis nilai ini. Oleh karena itu, pelatihan kepemimpinan transformasional dan pembentukan budaya kerja partisipatif harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi birokrasi daerah.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan strategi komunikasi publik yang dijalankan pemimpin Aceh berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat di era digital. Dengan mengadaptasi pendekatan komunikasi yang partisipatif dan memanfaatkan media digital, pemimpin berhasil membangun hubungan emosional yang kuat dengan masyarakat, memperkuat keterlibatan dalam pembangunan. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan keterbatasan literasi teknologi masih menghambat pemerataan komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya memperluas akses, meningkatkan literasi digital, dan melibatkan tokoh lokal untuk memperkuat komunikasi berbasis nilai. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kepemimpinan transformasional dan merekomendasikan studi lanjutan berbasis lapangan serta pendekatan komparatif untuk mengkaji efektivitas komunikasi publik berbasis nilai di berbagai daerah.

Daftar Rujukan

Adriyana, L., & Cahyaningtyas, D. F. (2023). Tinjauan digitalisasi benda bersejarah dari budaya lisan menjadi arsip pemerintah. *Journal of Documentation and Information Science*, 7(1).

Ahmad, N., Pohan, K. N. K., Alfira, S., Aufia, K., Paripurna, C. F., & Aji, M. P. (2024).

Analisis strategi komunikasi politik Ridwan Kamil di media sosial Instagram dalam

- membangun citra diri menuju PILGUB DKI Jakarta 2024. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1992>
- Al Ghifary, M. N., Az Zahra, Z. B., Yusron, N. R., & Yuningsih, S. (2024). Analisis pelestarian Tari Saman Aceh sebagai identitas budaya lokal Indonesia terhadap pengaruh globalisasi di era modern. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 8(2), 127-145.
- Alwan, F., & Kusumandyoko, T. C. (2023). Perancangan visual storytelling media sosial sebagai upaya peningkatan brand awareness di Mojadiapp. *BARIK - Jurnal S1 Desain Komunikasi Visual*, 5(1), 168-182.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/article/view/56344>
- Bintang, R. U., Nugraha, M. A., & Azis, A. (2024). Peran Adat Alas dalam Perkembangan Kaum Muda di Aceh Tenggara. *Polyscopia*, 1(1), 26-31.
<https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i1.1236>
- Colina, Y. (2021). Implementasi kebijakan pembangunan bidang agama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Danum Pabelum: Jurnal Teologi dan Musik Gereja*, 1(2), 236-245. <https://doi.org/10.54170/dp.v1i2>
- Dwihantoro, P., Susanti, D., Sukmasya, P., & Faizah, R. (2023). Digitalisasi kesenian Njanen: Strategi pelestarian kebudayaan melalui platform sosial media. *Madaniya: Jurnal Pengabdian*, 4(1).
- Fantini, E., & Tamba, R. S. (2023). *Mediamorfosis edukasi informal online melalui platform digital sebagai peluang bisnis baru*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 17(1). <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/bijak/article/view/831>
- Fanzikri, M. (2022). *Partisipasi perempuan dalam kelembagaan dan pembangunan desa di Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry. Diakses dari <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/87174275/277-libre.pdf>
- Fatma, E., & Syahrani, R. A. (2024). Pemanfaatan media sosial di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat sebagai komunikasi publik di Aceh Barat. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 4(8).
<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i8.1334>
- Hilmi, M., Alfandi, M., & Pridayanti, S. (2022). Strategi komunikasi radio komunitas pendidikan dan dakwah dalam mempertahankan eksistensi di Kota Semarang. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 8(2), 127-145.
- Kasim, F. M., & Nuridin, A. (2016). Resolusi konflik berbasis kearifan lokal di Aceh: Studi tentang eksistensi dan peran lembaga adat dalam membangun perdamaian di Kota Lhokseumawe. *Ilmu Ushuluddin*, 3(1). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ilmu-ushuluddin/article/view/4855>
- Maawiyah, A., & Syahrizal, S. (2023). Integrasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam pembelajaran pada PTKIN Aceh. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(4), 3074-3084. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.4321>
- Mahyudin, M., Reni, A., Darni, D., & Hasimin, H. (2022). Sosialisasi pentingnya partisipasi pemilih pemula. *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1-7.
<https://doi.org/10.30651/hm.v3i1.12302>
- Masriadi, M., Hasan, K., Andyna, C., & Bahri, R. (2021). Strategi komunikasi persuasif petugas Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang dalam memberikan informasi pembatalan ibadah haji 2020-2021 pada calon jamaah haji. *Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam*, 8(2), 99-107.
<https://doi.org/10.37064/jki.v8i2.10726>
- Mildad, J. (2013). *Sistem komunikasi pemerintah melalui musrenbang dalam pembangunan agama masyarakat di Kabupaten Aceh Utara* (Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).

- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tersedia di <http://repository.uinsu.ac.id/1444/>
- Mushallin, M., Hasan, E., & Ahmady, I. (2022). Tantangan Partai Aceh dalam pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Universitas Syiah Kuala*, 7(1), 1-15. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/19251>
- Muthia, C. (2021). Nilai-nilai agama Islam dalam budaya dan adat masyarakat Aceh. *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam (JRKPI)*, 1(1), 52-60. <https://doi.org/10.29313/jrkpi.v1i1.170>
- Pramana, M. A., & Arung Triantoro, D. (2024). Budaya anak muda, globalisasi, dan hiburan populer: Komunitas Standupindo Dumai Indonesia. *Scriptura*, 14(1), 49-58. <https://doi.org/10.9744/scriptura.14.1.49-58>
- Prasetyo, M. A. M. (2022). Pesantren efektif: Studi gaya kepemimpinan partisipatif. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 1-12. https://repository.iainhokseumawe.ac.id/id/eprint/302/1/ARTIKEL%20JURNAL_Pesantren%20Efektif.pdf
- Rakhmadani, R. (2022). Implementasi model komunikasi dua arah dalam program Curhat Ning Ita guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kota Mojokerto. *The Commercium*, 5(1), 1-12. <https://doi.org/10.26740/tc.v5i1.45328>
- Ranisa, D. D., Mulyazir, & Rifai, A. (2024). Cultural teachings of Acehese society and their implications for interfaith harmony in Peunayong. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 24(2). <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v24i2.23962>
- Rozali, Y. A. (2022). *Penggunaan analisis konten dan analisis tematik*. Forum Ilmiah, 19(1), 68-74. Universitas Esa Unggul. Tersedia di https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23187-11_2247.pdf
- Sabrina, R. (2021). *Manajemen sumber daya manusia: Unggul, kreatif, dan inovatif di era revolusi industri 4.0*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 22(2). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/7703>
- Siregar, H. (2022). *Analisis pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi Pancasila*. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 2(1). <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.102>
- Sofyan, A., Laksono, P., & Chabibi, M. (2020). Strategi komunikasi politik ulama Nahdlatul Wathan Pancor dalam membentuk opini publik pada Pemilu Presiden tahun 2019. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam*, 5(2), 57-73. <https://doi.org/10.31538/altsiq.v5i2.965>
- Sukri, K. (2017). Hubungan gaya kepemimpinan transformasional dan religiusitas dengan kinerja karyawan. *Psikoislam: Jurnal Psikologi dan Keislaman*, 2(2). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/view/1891>
- Yati, P., Putri, M., Putri, S. Y., Junia, J., Susanti, R., & Natalia, A. C. (2023). Dakwah Islam melalui media sosial sebagai sarana pendidikan. *Proceeding Conference on Da'wah and Communication Studies*, 2(1), 85-94. <https://doi.org/10.61994/cdcs.v2i1.85>
- Yusransal, Y., Marwan, M., & Syahrin, A. (2023). Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan budaya organisasi terhadap kompetensi guru sekolah dasar di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmu Sejarah*, 8(4). <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/28475>